

**ANALISIS PENENTUAN BIAYA TIDAK LANGSUNG
PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti
Ujian Oral Comprehensive Sarjana Lengkap
Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh :

YASRI YANTO
10673004967

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2011**

ABSTRAK

Analisis Penentuan Biaya Tidak Langsung Pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru

Oleh : Yasri Yanto

PT. Perkebunan Nusantara V adalah perusahaan milik Negara yang bergerak dibidang perkebunan yang menghasilkan minyak sawit dan inti sawit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah biaya tidak langsung yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 14. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan masukan bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan laporan harga pokok produksi khususnya biaya tidak langsung.

Data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Permasalahan yang penulis temukan adalah, Perusahaan mencatat secara keseluruhan biaya pemeliharaan bangunan yang terdiri dari pemeliharaan gedung kantor, gudang dan bengkel kedalam biaya tidak langsung. Perusahaan mengelompokkan semua pengeluaran lain-lain kedalam biaya tidak langsung. Dalam menghitung biaya penyusutan, perusahaan mengakui seluruh biaya penyusutan aset tetap kedalam biaya tidak langsung pabrik, padahal terdapat aset tetap yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi yaitu penyusutan rumah tinggal dan penyusutan bangunan kantor. Perusahaan menggabungkan asuransi pabrik kedalam biaya langsung, seharusnya asuransi pabrik tersebut dimasukkan kedalam biaya tidak langsung. Dan asuransi yang terdapat pada kelompok biaya tidak langsung dimasukkan kedalam beban asuransi. Dan dalam penentuan biaya tidak langsung perusahaan tidak mencatat sesuai dengan standar akuntansi keuangan No. 14.

Akibat kesalahan tersebut biaya tidak langsung menjadi lebih rendah, laporan harga pokok produksi juga rendah, sedangkan laba/kotor menjadi tinggi. Oleh sebab itu dalam perhitungan dan pencatatan biaya tidak langsung sebaiknya perusahaan melakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan.

Kata kuncinya : Biaya Tidak Langsung, PSAK No 14.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.	i
KATA PENGANTAR.	ii
DAFTAR ISI.	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Metologi Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.	8
BAB II : TELAAH PUSTAKA	
A. Pengertian Biaya Produksi	10
B. Pengertian Biaya Overhead Pabrik.....	17
C. Penggolongan Biaya Overhead Pabrik.....	19
D. Penentuan Tarif Biaya Overhead Pabrik.....	21
E. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Pemilihan Tarif Biaya Overhead	22
F. Langkah-Langkah Penentuan Tarif Biaya Overhead Pabrik	23
G. Metode Pembebanan Biaya Overhead Pabrik Kepada Produk Atas Dasar Tarif	28
H. Siklus Akuntansi Biaya Dalam Perusahaan Manufaktur	29
I. Laporan Biaya Produksi.	33
L. Islam dan Produksi.	37
BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Singkat Perusahaan	41
B. Struktur Organisasi.....	43
C. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab.	47
C. Aktifitas Perusahaan.....	51
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Biaya Pemeliharaan Bangunan Pabrik	57

	B. Biaya Lain-lain	59
	C. Biaya Penyusutan	62
	D. Biaya Asuransi.	64
	E. Laporan Harga Pokok Produksi.....	66
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran-Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI

BAB I

PENDUHLUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan berusaha memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, dimana keuntungan tersebut dapat dipergunakan untuk mengembangkan perusahaan. Apalagi dilihat dari perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, menuntut perusahaan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, pengolahan, pengalokasian, penganalisaan serta pengiktisaran data biaya yang bertujuan untuk perencanaan pengendalian biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Proses akuntansi biaya dapat ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai luar perusahaan maupun internal perusahaan. Selain itu tugas terpenting dari akuntansi biaya adalah untuk mengumpulkan dan menjelaskan data biaya, baik itu data aktual maupun proyeksi.

Akuntansi biaya mempunyai tiga tujuan pokok yaitu penentuan harga pokok produk, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus. Untuk memenuhi tujuan penentuan harga pokok produksi, akuntansi biaya mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa.

Biaya produksi, yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengolahan bahan baku menjadi produk selesai yang siap untuk dijual. Secara umum ada dua cara

dalam pengumpulan biaya produksi yaitu metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Harga pokok pesanan adalah penentuan harga pokok produksi dimana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk sejumlah produk tertentu atau suatu jasa yang dapat dipisahkan identitasnya, dan perlu ditentukan harga pokok secara individual. Sedangkan metode harga pokok proses adalah cara penentuan harga pokok produksi yang membebankan biaya produksi selama periode tertentu pada proses atau kegiatan produksi dan membagikannya sama rata kepada produk yang dihasilkan dalam periode tersebut.

Biaya produksi merupakan biaya yang perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh perusahaan, karena biaya produksi ini biasanya relatif besar dibandingkan dengan biaya-biaya lain. Untuk itu biaya tersebut perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian supaya biaya produksi ini dapat ditekan agar perusahaan dapat mencapai laba maksimum.

Elemen biaya produksi yang dapat dikendalikan diantaranya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku tersebut merupakan biaya yang dapat ditelusuri dalam produk jadi, biaya tenaga kerja merupakan proses perubahan bahan baku menjadi barang jadi dan jasanya dapat ditelusuri pada produk jadi tersebut, sedangkan biaya overhead pabrik adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi atau juga disebut biaya tidak langsung.

Salah satu permasalahan yang penting dalam perusahaan perkebunan adalah masalah penentuan harga pokok produksi karena harga pokok produksi merupakan suatu pedoman guna menentukan harga pokok penjualan. Dengan adanya berbagai masalah dalam penentuan harga pokok produksi maka diperlukan suatu informasi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut.

PT. Perkebunan Nusantara V adalah salah satu perusahaan milik Negara (Persero) yang bergerak dibidang perkebunan, yang menghasilkan komoditi kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit menghasilkan minyak sawit (CPO) dan inti sawit.

Dalam mengelompokkan biaya produksi, perusahaan menggunakan metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses merupakan cara penentuan harga pokok produksi yang membebankan biaya produksi selama periode tertentu pada kegiatan produksi dan membagikannya sama rata pada produk yang dihasilkan dalam periode tersebut.

Permasalahan yang peneliti temukan adalah pada kelompok biaya tidak langsung terdapat biaya pemeliharaan bangunan sebesar Rp 4.772.792.410, dimana sebesar Rp 2.715.718.881 merupakan biaya pemeliharaan gedung kantor. Seharusnya biaya pemeliharaan gedung kantor ini dimasukkan kedalam beban operasi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.14 paragraf 34 tahun 2009 menyatakan bahwa biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode tertentu atau biaya operasi yang dapat diaplikasikan pada pendapatan, diakui sebagai beban selama

periode laporan keuangan, diklasifikasikan sesuai dengan hakikatnya. Hal ini mengakibatkan biaya tidak langsung menjadi lebih tinggi dari seharusnya, sehingga harga pokok produksi juga tinggi. (lihat lampiran 15/2-4)

Selanjutnya perusahaan mengelompokkan semua pengeluaran lain-lain sebesar Rp 18,409,515,940 (lihat lampiran 15) kedalam biaya tidak langsung. Seharusnya perusahaan tidak menggabungkan seluruh pengeluaran lain-lain kedalam biaya pabrik karena terdapat biaya yang dikeluarkan untuk fungsi administrasi kantor sebesar Rp 7.750.406.221 yang terdiri dari persediaan kantor dan alat tulis sebesar Rp 5,706,949,941, buku, surat kabar dan majalah sebesar Rp 1,159,799,504, biaya bank sebesar Rp 128,866,612, biaya foto copy sebesar Rp 36,819,032 dan biaya makan/minum sebesar Rp 717,971,122 (lihat lampiran 15/2-4). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 14 paragraf 14 bahwa biaya lain-lain hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang biaya tersebut berada pada tempat atau kondisi yang siap untuk dijual atau dipakai. Kesalahan ini mempengaruhi tingginya harga pokok produksi.

Permasalahan berikutnya adalah dalam menghitung biaya penyusutan, perusahaan mengakui seluruh biaya penyusutan sebesar Rp 41.360.033.941 kedalam biaya tidak langsung. Padahal ada biaya penyusutan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi yaitu penyusutan rumah tinggal sebesar Rp 1.654.401.358 dan penyusutan bangunan perusahaan sebesar Rp 82.720.068 (lihat lampiran 15/2-4). Menurut PSAK No. 11 bahwa biaya konversi meliputi biaya yang

secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel yang dialokasikan secara sistematis yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi barang jadi.

Pada permasalahan berikutnya perusahaan menggabungkan asuransi pabrik kedalam biaya langsung sebesar Rp 8.310.320.884. seharusnya asuransi pabrik tersebut dimasukkan kedalam biaya tidak langsung. Sedangkan asuransi yang terdapat pada kelompok biaya tidak langsung dimasukkan kedalam biaya asuransi. Menurut PSAK No. 14 bahwa biaya asuransi akan diperoleh jika persediaan rusak atau hilang. Biaya. Praktek nilai persediaan dibawah biaya menjadi nilai realisasi netto konsisten dengan pandangan bahwa aset seharusnya tidak dinyatakan melebihi perkiraan jumlah yang direalisasikan. Kesalahan ini akan mempengaruhi besarnya harga pokok produksi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti tentang biaya tidak langsung serta menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **Analisis Penentuan Biaya Tidak langsung Pada PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru.**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut “ Apakah penentuan biaya tidak langsung pada PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 14.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah penentuan biaya tidak langsung pada PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru sudah sesuai dengan PSAK No 14.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang akuntansi, khususnya biaya biaya tidak langsung.
- b. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi perusahaan. Sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan biaya tidak langsung.
- c. Menjadi tambahan informasi untuk peneliti lain, yang meneliti hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini dimasa datang.

D. Metodologi Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru Jl Rambutan No.43 Pekanbaru.dan waktu penelitian adalah Agustus – November 2010.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penulisan penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang langsung penulis peroleh dari objek penelitian berupa penjelasan dari pimpinan perusahaan dan karyawan dibagian personalia mengenai kegiatan perusahaan, serta penjelasan mengenai perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung dari bagian akuntansi.
- b. Data sekunder, yaitu data atau informasi yang diolah perusahaan berupa Laporan Laba Rugi, Neraca, Laporan Harga Pokok Produksi, Sejarah Perusahaan, dan Struktur Organisasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu :

- 1) Wawancara : yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak terkait atau pejabat yang berwenang seperti bagian akuntansi dan administrasi.
- 2) Dukumentasi : dengan melihat laporan keuangan seperti daftar laba rugi, neraca dan laporan harga pokok produksi.

4. Analisa Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis sedemikian rupa, sehingga dapat dibandingkan dengan teori yang telah ada dipelajari dalam perkuliahan dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang skripsi berikut ini dikemukakan sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

menguraikan mengenai latar belakang masalah , perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Menguraikan landasan teoritis sehubungan dengan judul penelitian

BAB III : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Menjelaskan gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah perusahaan, struktur organisasi dan aktivitas perusahaan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan masalah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir yang membuat tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan sebelumnya dan juga saran yang dianggap perlu.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Biaya Produksi

Untuk mengelola suatu perusahaan, diperlukan informasi biaya yang sistematis dan komparatif. Informasi ini membantu manajemen untuk dapat menetapkan sasaran laba perusahaan dimasa akan datang, menetapkan target departemen menuju pencapaian sasaran akhir, mengevaluasi keefektifitas rencana, dan lain sebagainya. Oleh karena itu akan sangat penting bagi manajemen untuk mengetahui pengertian, objek serta penggolongan biaya secara lebih mendalam.

Seringkali orang menyamakan istilah *Cost* dan *Expenses*, namun kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda dan untuk membedakan kedua istilah tersebut perlu diberikan batasan yang jelas.

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) yang ditulis oleh Masyah Kholmi dan Yuningsih dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Biaya* (2003:11), menyebutkan biaya adalah Pengurangan pada aktiva netto sebagai akibat digunakannya jasa-jasa ekonomi untuk menciptakan penghasilan.

Menurut Hansen dan Mowen (2004:40)Biaya adalah kas atau ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau dimasa datang bagi organisasi.

Dari defenisi diatas, terdapat beberapa unsur yang tersirat dalam defenisi biaya, yaitu:

1. Pengorbanan sumber ekonomi guna mencapai tujuan yang diharapkan serta dapat diukur dengan satuan moneter (satuan uang).
2. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu yaitu untuk memperoleh barang dan jasa dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan (manfaat) baik pada saat ini maupun dimasa akan datang.
3. Sebagai pengguna atas aktiva bersih untuk memperoleh penghasilan.

Sementara itu biaya dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat dimasa depan. Pada perusahaan yang berorientasi laba, manfaat masa depan biasanya berarti pendapatan. Jikan biaya telah dihabiskan dalam proses menghasilkan pendapatan, maka biaya tersebut dinyatakan kadaluarsa (*expire*). Biaya yang kadaluarsa tersebut disebut beban (Hansen dan Mowen ,2004:41).

Sedangkan Ikatan Akuntan Indonesia (2002:18),mendefenisikan Beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalambentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian penanaman modal.

Produksi merupakan suatu usaha pengolahan secara optimal penggunaan sumber daya-sumber daya (faktor-faktor produksi) berupa tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah dan sebagainya dalam proses transformasi bahan mentah dengan tenaga kerja menjadi berbagai produk dan jasa (Handoko, 2002:13).

Dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. (Kotler, Dkk, 2006 : 67)

Mengenai pengertian biaya produksi Mulyadi (2000:13) mengemukakan biaya produksi sebagai berikut:

Biaya produksi berarti biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi yang siap untuk dijual.

Selanjutnya definisi biaya produksi yang dikemukakan oleh Hariadi (2002:26) adalah biaya produksi yakni biaya yang berhubungan langsung dengan produksi dari suatu proses dan akan dipertemukan dengan penghasilan diperoleh produk untuk dijual.

Sedangkan menurut Henry Simomora (2000:551). Biaya produksi meliputi biaya sumber daya yang dimasukkan kedalam produksi selama periode tersebut, dimana biaya pokok industri atas semua barang yang dirampungkan selama periode tersebut. Biaya ini meliputi biaya untuk memproduksi ditambah dengan persediaan awal barang dalam proses dikurangi persediaan akhir dalam proses.

Menurut Charles T Horngern (2007:12). Biaya adalah semua biaya produksi yang dianggap sebagai aktiva dalam neraca ketika terjadi dan selanjutnya menjadi harga pokok penjualan ketika produk itu di jual.

Berdasarkan uraian teoritis di atas maka dapat disimpulkan bahwa biaya produksi merupakan nilai tukar pengorbanan dengan tujuan untuk memperoleh mamfaat di mana dalam akuntansi pengorbanan tersebut dinyatakan pengurangan kas maupun aktiva lainnya baik pada saat ini maupun dimasa datang.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hansen dan Mowen (2004:56) adalah biaya pabrik (*factory cost*) yaitu semua biaya yang terjadi serta dapat didalam lingkungan tempat dimana proses produksi berlangsung. Biaya-biaya pabrik ini dibedakan lagi menjadi tiga kelompok biaya yaitu bahan mentah (*direct material cost*), biaya tenaga kerja langsung, (*direct labour cost*) dan biaya overhead pabrik (*biaya tidak langsung*).

Dari pendapat-pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang menjadi harga pokok produksi adalah penjumlahan dari ketiga unsur biaya produksi atau tiga elemen dari biaya produksi yaitu:

1. Biaya bahan baku langsung
2. Biaya tenaga kerja langsung
3. Biaya overhead pabrik

Menurut Samryn (2001:27) bahwa harga pokok produk meliputi semua biaya yang terjadi dalam rangka pembelian dan pembuatan produk. Yang termasuk dalam kelompok biaya ini adalah biaya bahan baku langsung, biaya upah langsung dan biaya overhead pabrik.

1. Biaya Bahan Baku Langsung

Bahan baku langsung adalah bahan-bahan yang dipakai dalam proses produksi yang dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasi dengan barang jadi yang dihasilkan.

Menurut Blocher Chen dan Lin (2001:87) bahan baku langsung adalah bahan yang digunakan dalam pengolahan produk yang dapat menjadi bagian fisik produk akhir.

Seringkali pada satu periode akuntansi terjadi harga beli bahan baku yang berbeda dari pembelian yang satu dengan pembelian yang lain. Hal ini menyebabkan persediaan bahan baku yang ada digudang mempunyai harga pokok per satuan yang berbeda pula meski jenisnya sama. Hal ini timbul masalah mengenai harga pokok bahan yang dipakai perlu adanya metode kalkulasi bahan dalam menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam proses produksi.

2. Biaya Upah Langsung

Tenaga kerja berperan dalam menjalankan mesin-mesin dan melaksanakan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh mesin. Atas jasa yang diberikan tenaga kerja tersebut, akan diberikan balas jasa yang dikenal dengan gaji atau upah dan pembayaran- pembayaran lainnya. Semua pembayaran itu merupakan biaya tenaga kerja yang harus dibebankan sebagai biaya langsung maupun tidak langsung.

Menurut Sulastiningsih (1999:165) mengemukakan bahwa Tenaga kerja langsung merupakan biaya utama dan sekaligus biaya konversi yaitu gaji dan kesejahteraan karyawan pabrik. Sedangkan tenaga tak langsung merupakan biaya untuk tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses pembuatan produk.

Sedangkan menurut Rayburn (1999:32) tenaga kerja langsung adalah upah yang diperoleh pekerja yang mengubah bahan yang dalam keadaan mentah menjadi produk jadi.

Dengan demikian yang dimaksud dengan tenaga kerja langsung adalah upah para karyawan yang secara langsung dapat dibebankan kepada produk jadi.

Berdasarkan fungsi yang ada diperusahaan, biaya tenaga kerja di kelompokkan kedalam :

- a. Biaya tenaga kerja produksi
 1. Gaji karyawan produksi
 2. Gaji manager pabrik
 3. Gaji mandor pabrik

4. Biaya kesejahtraan karyawan
5. Upah karyawan pabrik
6. Biaya kesejahtraan karyawan pabrik
- b. Biaya tenaga kerja pemasaran
 1. Upah karyawan pemasaran
 2. Biaya kesejahteraan karyawan pemasaran
 3. Biaya komisi pramuniaga
 4. Gaji manager pemasaran
- c. Biaya tenaga kerja administrasi dan umum
 1. Gaji karyawan bagian akuntansi
 2. Gaji karyawan bagian personalia
 3. Gaji karyawan bagian keuangan
 4. Gaji direktur, wakil direktur
 5. Berbagai biaya kesejahteraan karyawan bagian administrasi dan umum.

a. Penentuan Besarnya Biaya Tenaga Kerja

Biaya tenaga kerja adalah semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan, umumnya perusahaan kecil menggunakan system penggajian dengan jumlah tetap per bulan dan gaji atas dasar hari kerja atau jam kerja, sedangkan perusahaan relatif besar sistem penggajian atas dasar kontrak perjanjian kerja dengan organisasi karyawan, penelitian atas produktivitas, evaluasi jabatan atau pekerjaan, program pembiayaan laba, program insentif, program jaminan upah minimum.

1). Program gaji dan upah insentif

Tujuan program insentif adalah meningkatkan produktivitas karyawan yang secara tidak langsung akan meningkatkan penghasilan karawan dan dapat menekan biaya produksi satuan. Sistem program insentif terdiri atas :

- a. Sistem premi bonus berdasarkan jam kerja

- b. Sistem premi bonus berdasarkan satuan hasil.

2). Premi lembur

Premi lembur dibayarkan kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja standar Rp 200 per jam atau lembur Rp 100 per jam.

3. Biaya Tidak Langsung (Biaya Overhead Pabrik)

Biaya overhead pabrik adalah elemen biaya produksi yang tidak diklasifikasikan sebagai biaya bahan baku langsung atau biaya tenaga kerja langsung

Menurut Mulyadi (2000:208) biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokkan beberapa golongan berikut ini:

- a) Biaya bahan penolong
- b) Biaya reparasi dan pemeliharaan
- c) Biaya tenaga kerja tidak langsung
- d) Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap
- e) Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu
- f) Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan langsung uang tunai.

B. Pengertian Biaya Overhead Pabrik

Banyak para ahli akuntansi mendefenisikan biaya overhead pabrik dengan kalimat yang berbeda-beda, tetapi pengertian yang diberikannya adalah: sama

Menurut Charter dan Usry (2006:411) Biaya overhead pabrik didefenisikan sebagai bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan semua biaya

pabrik lainnya yang tidak dapat secara nyaman diidentifikasi dengan atau dibebankan langsung ke pemesanan, produk, atau objek biaya lain yang spesifik.

Kholmi (2004:55) mendefinisikan biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung atau semua biaya produksi tidak langsung.

Sedangkan Munadar (2001:157) memberikan definisi biaya pabrik langsung atau biaya overhead pabrik adalah:

Biaya pabrik tidak langsung ialah semua biaya yang terdapat serta terjadi didalam lingkungan pabrik, tetapi secara langsung berhubungan dengan kegiatan proses produksi, yaitu proses pengubahan bahan mentah menjadi barang lain yang nantinya dijual.

Biaya overhead pabrik pada umumnya didefinisikan sebagai biaya tidak langsung, upah tidak langsung, dan biaya overhead yang tidak dapat dibebankan langsung pada suatu pekerjaan, hasil produksi, atau objek-objek tertentu lainnya seperti kontrak-kontrak pemerintah.

Dari definisi tersebut diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa biaya overhead pabrik adalah biaya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa selain dari biaya bahan langsung atau upah langsung.

Pengolahan biaya overhead pabrik dapat dilakukan dengan berbagai cara, dimana penggolongan ini tidaklah sama antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena setiap perusahaan mempunyai sendiri didalam proses pengolahan hasil produksinya.

C. Penggolongan Biaya Overhead Pabrik

Pada prakteknya memang sulit untuk mengklasifikasikan suatu biaya termasuk golongan biaya overhead pabrik atau bukan. Namun demikian ada beberapa karakteristik yang dapat membantu dalam mengidentifikasi apakah suatu biaya yang termasuk dalam kelompok biaya overhead pabrik atau tidak.

Menurut Mulyadi (2000:207) biaya overhead pabrik dapat digolongkan dengan tiga cara penggolongan yaitu:

- a) Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya
- b) Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan.
- c) Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen.

1. Penggolongan Biaya Overhead Pabrik Menurut Sifatnya

Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan biaya overhead adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.

Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan berikut ini:

- a. Biaya bahan penolong.
- b. Biaya reparasi dan pemeliharaan.
- c. Biaya tenaga kerja tidak langsung.
- d. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aset tetap.
- e. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu.
- f. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai.

2. Pengelolaan Biaya Overhead Pabrik Menurut Perilakunya Dalam Hubungan Dengan Perubahan Volume Kegiatan.

Ditinjau dari perilaku unsur-unsur biaya overhead pabrik dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya overhead dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- a. Biaya overhead tetap

Biaya overhead tetap adalah biaya overhead yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu.

- b. Biaya overhead variable.

Biaya overhead variabel adalah biaya overhead yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan.

- c. Biaya overhead semi variabel.

Biaya overhead semi variabel adalah biaya overhead yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan.

3. Penggolongan Biaya Overhead Pabrik Menurut Hubungannya dengan Departemen.

Ditinjau dari hubungannya dengan departemen-departemen yang ada dalam pabrik, biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Biaya overhead langsung departemen (*direct departemen overhead expenses*)

Biaya overhead langsung departemen adalah biaya overhead yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut.

- b. Biaya overhead tidak langsung departemen (*indirect departemen overhead expenses*)

Biaya overhead tidak langsung departemen adalah biaya overhead yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen.

D. Penentuan Tarif Biaya Overhead Pabrik.

Alasan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka adalah sebagai berikut:

1. Pembebanan biaya overhead pabrik atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi seringkali mengakibatkan berubah-ubahnya harga pokok per satuan

produk yang dihasilkan dari bulan yang satu ke bulan yang lain. Apabila biaya overhead yang sesungguhnya terjadi dibebankan kepada produk, maka harga pokok produksi per satuan mungkin akan berfluktuasi karena sebab berikut ini:

- a. Perubahan tingkat kegiatan produksi dari bulan ke bulan.
 - b. Perubahan tingkat efisien produksi.
 - c. Adanya biaya overhead pabrik yang terjadinya secara sporadik, menyebar tidak merata selama jangka waktu setahun.
 - d. Biaya overhead pabrik tertentu sering terjadi secara teratur pada waktu-waktu tertentu.
2. Dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan menggunakan metode harga pokok pesanan, manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi per satuan pada saat pesanan selesai dikerjakan.

E. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Pemilihan Tarif Biaya Overhead Pabrik.

Jenis tarif overhead pabrik berbeda tidak hanya dari suatu perusahaan ke perusahaan lain, tetapi juga dari suatu departemen, pusat biaya, atau tempat penampungan biaya ke departemen, pusat biaya, atau tempat penampungan biaya lain di dalam satu perusahaan.

Menurut Charter dan Usry (2004:413) paling tidak ada lima faktor yang mempengaruhi pemilihan tarif overhead, yaitu:

1. Dasar yang digunakan
 - a. Output fisik
 - b. Biaya bahan baku langsung
 - c. Biaya tenaga kerja langsung
 - d. Jam tenaga kerja langsung
 - e. Jam mesin
 - f. Transaksi atau aktivitas
2. Pemilihan tingkat aktivitas.
 - a. Kapasitas teoritis
 - b. Kapasitas praktis
 - c. Kapasitas aktual yang diperkirakan
 - d. Kapasitas normal
 - e. Dampak kapasitas terhadap tarif overhead
 - f. Kapasitas menganggur versus kelebihan kapasitas
3. Memasukkan atau tidak memasukkan overhead tetap.
 - a. Perhitungan biaya penerapan penuh
 - b. Perhitungan biaya langsung
4. Menggunakan tarif tunggal atau beberapa tarif.
 - a. Tarif tingkat pabrik
 - b. Tarif departemen
 - c. Tarif sub departemental dan aktivitas
5. Menggunakan tarif yang berbeda untuk aktivitas jasa.

F. Langkah-Langkah Penentuan Tarif Biaya Overhead Pabrik.

Penentuan tarif biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui tiga tahap berikut ini:

1. Menyusun Anggaran Biaya Overhead Pabrik.

Dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik harus diperhatikan tingkat kegiatan (*kapasitas*) yang akan dipakai sebagai penaksiran biaya overhead pabrik.

Ada tiga macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran biaya overhead pabrik yaitu:

- a. Kapasitas teoritis (*theoretical capacity*) adalah kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu.
- b. Kapasitas normal (*normal capacity*) adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang.
- c. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan (*expected actual capacity*) adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang.

2. Memilih Dasar Pembebanan Biaya Overhead Pabrik Kepada Produk

Setelah kita menyusun anggaran untuk biaya overhead pabrik, langkah selanjutnya adalah memilih dasar yang akan dipakai untuk membebankan biaya overhead kepada produk supaya terdapat pembebanan yang adil. Menurut Sunarto (200:42) ada lima basis dasar pembebanan biaya overhead pabrik yaitu:

a. Output Fisik.

Metode ini adalah metode yang paling sederhana dan langsung membebankan biaya overhead pabrik kepada produk. Biaya overhead untuk setiap produk, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Overhead Pabrik per Unit} = \frac{\text{Estimasi Overhead Pabrik}}{\text{Estimasi unit produksi}}$$

Contoh:

Jika overhead pabrik yang diestimasikan adalah sebesar Rp. 300.000.- dan perusahaan bermaksud untuk memproduksi 250.000 unit selama priode depan, setiap unit yang sudah selesai akan dibebankan sebesar Rp. 1,20 (Rp. $300.000 \div 250.000$ unit) sebagai bagiannya atas overhead pabrik. Suatu pesanan dengan $1.000 \times \text{Rp } 1,20 = \text{Rp. } 1.200$ dari overhead pabrik.

Metode ini cocok digunakan dalam perusahaan yang hanya menghasilkan suatu macam produk.

b. Biaya Bahan Baku Langsung

Pada beberapa perusahaan, penelitian atas biaya masa lalu membutuhkan adanya kolerasi antara biaya bahan langsung dengan biaya tidak langsung. Penelitian dapat membutuhkan bahwa persentase biaya tidak langsung hampir selalu sama terhadap biaya bahan langsung. Dalam hal yang demikian, pembebanan dihitung dengan membagi jumlah bahan langsung yang diperkirakan akan dipakai dalam proses produksi. Rumus perhitungan tarif biaya pabrik tidak langsung adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Overhead Pabrik} = \frac{\text{Estimasi Overhead Pabrik}}{\text{Estimasi Biaya Bahan Baku}} \times 100$$

Contoh:

Jika estimasi overhead pabrik totalnya sebesar Rp 300.000 dan estimasi biaya bahan baku totalnya sebesar Rp 250.000, maka setiap pesanan atau produk

dibebankan suatu jumlah overhead pabrik setara dengan $\text{Rp } 300.000 \div 250.000 = 1,20$ atau 120% dari biaya bahan baku langsung. Misalnya, jika bahan baku untuk suatu pesanan adalah sebesar $\text{Rp } 5.000$, maka pesanan tersebut akan menerima tambahan biaya sebesar $\text{Rp } 5.000 \times 120\% = \text{Rp } 6.000$ untuk overhead pabrik.

c. Biaya Tenaga Kerja Langsung

Menggunakan satu dasar tenaga kerja langsung untuk membebankan biaya overhead pabrik ke pesanan suatu produk memerlukan pembagian estimasi overhead dengan estimasi biaya tenaga kerja langsung untuk menghitung suatu persentase. Perumusannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Upah Langsung} = \frac{\text{Estimasi Overhead Pabrik}}{\text{Estimasi Biaya Tenaga Kerja Langsung}} \times 100$$

Contoh:

Jika estimasi overhead pabrik totalnya sebesar $\text{Rp } 300.000$ dan estimasi biaya tenaga kerja langsung totalnya sebesar $\text{Rp } 500.000$, maka tarif overhead pabrik adalah sebesar $\text{Rp } 300.000 \div 500.000 = 0,60$ atau 60%. Suatu pesanan atau produk dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar $\text{Rp } 12.000$ akan dibebankan biaya overhead sebesar $\text{Rp } 12.000 \times 60\% = \text{Rp } 7.200$.

d. Jam Tenaga Kerja Langsung

Dasar jam tenaga kerja langsung didesain untuk mengatasi kelemahan kedua dari penggunaan dasar biaya tenaga kerja langsung. Tarif overhead pabrik didasarkan pada jam tenaga kerja langsung dihitung sebagai berikut:

$$\text{Tarif per jam TKL} = \frac{\text{Estimasi Overhead Pabrik}}{\text{Estimasi Biaya Tenaga Kerja Langsung}}$$

Contoh:

Jika estimasi total overhead pabrik adalah sebesar Rp 300.000 dan jam tenaga kerja langsung totalnya diestimasi sebesar Rp 600.000, maka tarif overhead pabrik adalah sebesar $\text{Rp } 300.000 \div 600.000 = \text{Rp } 5$ per jam tenaga kerja langsung. Suatu pesanan atau produk yang memerlukan 800 jam tenaga kerja langsung akan dibebankan overhead pabrik sebesar $800 \times \text{Rp } 4.000 = 3.200.000$.

e. Jam Mesin

Apabila biaya overhead pabrik bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik terhadap produk atau pekerjaan adalah:

$$\text{Overhead Pabrik Per Jam Mesin} = \frac{\text{Estimasi Overhead Pabrik}}{\text{Estimasi Jam Mesin}} =$$

Contoh:

Jika total overhead pabrik diestimasi sebesar Rp. 300.000 dan total jam mesin diestimasi sebesar 20.000, maka tarif overhead pabrik adalah sebesar $\text{Rp. } 300.000 \div 20.000 = \text{Rp } 15$ per jam mesin. Suatu pesanan atau produk yang menggunakan 120 jam mesin dibebankan overhead pabrik sebesar $120 \times \text{Rp } 15 = \text{Rp. } 1.800$

3. Menghitung Tarif Biaya Overhead Pabrik.

Setelah tingkat kapasitas yang akan dicapai dalam periode anggaran ditentukan, dan anggaran biaya overhead pabrik telah disusun, serta dasar pembebanannya telah dipilih dan diperkirakan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif biaya overhead pabrik dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tarif Biaya Overhead Pabrik} = \frac{\text{Biaya Overhead yang dianggarkan}}{\text{Taksiran dasar pembebanan}}$$

G. Metode Pembebanan Biaya Overhead Pabrik Kepada Produk Atas Dasar Tarif

Penggunaan teknologi maju dalam proses manufaktur menyebabkan kenaikan yang signifikan persentase biaya overhead pabrik dalam struktur biaya produk. Besarnya proporsi biaya overhead pabrik dalam keseluruhan biaya produk tersebut memaksa manajemen untuk tidak sekedar mengalokasikan biaya tersebut kepada produk, namun mendorong manajemen untuk mencari cara agar mereka mampu mengelola biaya tersebut. Biaya overhead pabrik bukan terjadi untuk sekedar dialokasikan kepada produk yang menikmati terjadinya biaya tersebut, namun jauh lebih dari itu, biaya overhead pabrik mencerminkan konsumsi sumber daya dalam pelaksanaan aktivitas tertentu. Mulyadi (1998:31)

Tarif biaya overhead pabrik yang telah ditentukan di muka kemudian digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk yang diproduksi. Jika perusahaan menggunakan metode *Full Costing* didalam penentuan

harga pokok produksinya, produk akan dibebani biaya overhead dengan menggunakan tarif biaya overhead variabel dan tarif biaya overhead tetap. Jika perusahaan menggunakan metode variabel costing di dalam penentuan harga pokok produksinya, produk akan dibebani biaya overhead dengan menggunakan tarif biaya overhead variabel saja.

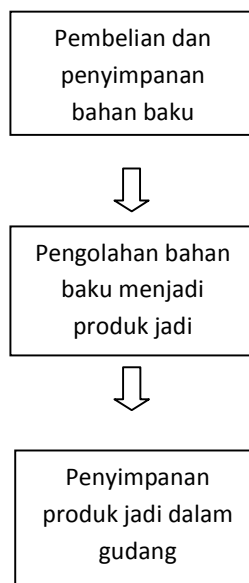
Dalam metode *variable costing*, biaya overhead tetap tidak diperhitungkan sebagai unsur biaya produksi, sehingga tidak diperhitungkan sebagai unsur harga pokok persediaan produk jadi maupun persediaan produk dalam proses biaya overhead tetap diperhitungkan sebagai biaya periode.

H. Siklus Akuntansi Biaya Dalam Perusahaan Manufaktur

Siklus kegiatan perusahaan manufaktur dimulai dengan pengolahan bahan baku dibagian produksi dan berakhir dengan penyerahan produk jadi ke bagian gudang. Dalam perusahaan tersebut, siklus akuntansi biaya dimulai dengan pencatatan harga pokok bahan baku yang dimasukkan dalam proses produksi, dilanjutkan dengan pencatatan biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang dikonsumsi untuk produksi serta berakhir dengan disajikannya harga pokok produk jadi yang diserahkan oleh bagian produksi ke bagian gudang. Akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur bertujuan untuk menyajikan informasi harga pokok produksi per satuan produk jadi yang diserahkan ke bagian gudang.

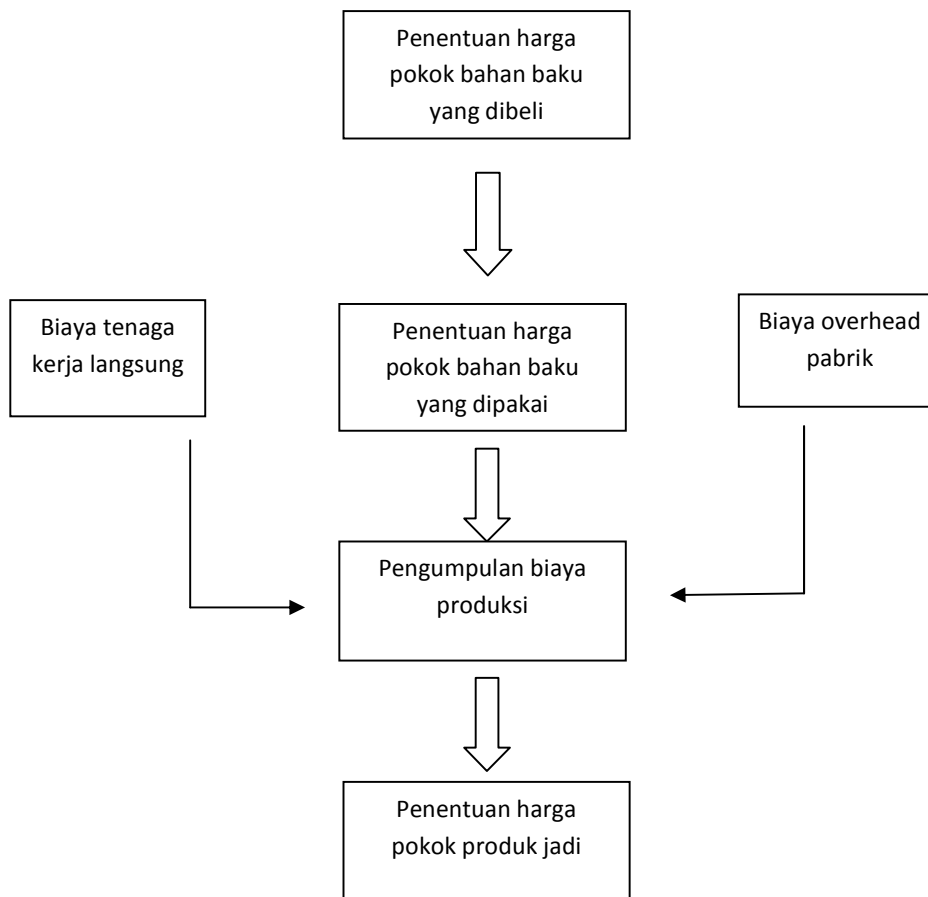
Siklus akuntansi biaya daalm perusahaan manufaktur digunakan untuk mengikuti proses pengolahan produk, sejak dari masuknya bahan baku ke dalam proses produksi samapai dengan dihasilkannya produk jadi dari proses tersebut. Hubungan antara siklus pembutan produk dan siklus akuntansi biaya dapat dilihat pada gambar II.I dan gambar II.2.

Gambar II.I : Siklus Pembutan Produk



Sumber : Mulyadi, Akuntansi Biaya, hal 38

Gambar II.2 : Siklus Akuntansi Biaya



Sumber : Mulyadi, Akuntansi Biaya, hal 38

Siklus akuntansi biaya dapat pula digambarkan melalui hubungan rekening-rekening buku besar. Untuk menampung biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, didalam buku besar dibentuk rekening-rekening berikut:

1. Barang Dalam Proses

Digunakan untuk mencatat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead (debit), dan harga pokok jadi yang ditransfer ke bagian gudang (kredit).

2. Persediaan Bahan Baku

Digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli (debit), dan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi (kredit).

3. Gaji dan Upah

Rekening ini merupakan rekening antara (*clearing account*) yang digunakan untuk mencatat utang gaji dan upah (debit), dan upah langsung yang digunakan untuk mengolah produk (kredit).

4. Biaya Overhead Pabrik

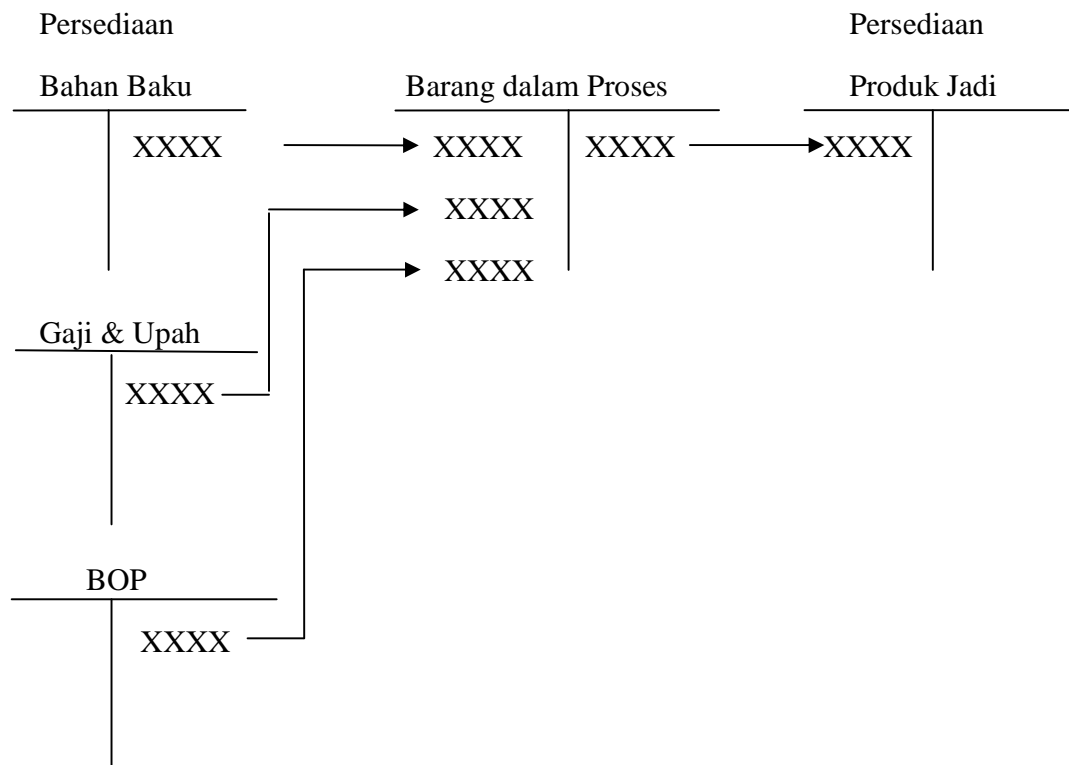
Digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi (debit), dan yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif (kredit).

5. Persediaan Produk Jadi

Digunakan untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer dari bagian produksi ke bagian gudang (debit), dan harga pokok produk yang dijual (kredit)

Siklus akuntansi biaya yang digambarkan melalui hubungan rekening-rekening buku besar dapat dilihat pada gambar II.3.

Gambar II.3 : Aliran Biaya Produksi Dalam Rekening Buku Besar



Sumber : M.F Usry dan L.H Hammer, Akuntansi Biaya, hal 126

I. Laporan Biaya Produksi

Niswonger (2000:200) memberikan defenisi laporan biaya produksi sebagai berikut:

Laporan biaya produksi adalah salah satu sumber informasi yang dapat digunakan oleh para menejer untuk mengendalikan dan memperbaiki operasi.

Sedangkan defenisi yang dikemukakan oleh Usry (2004:162) adalah sebagai berikut:

Laporan biaya produksi adalah kertas kerja yang menampilkan jumlah biaya yang diakumulasikan dan dibebankan ke produksi selama satu bulan atau periode lain.

Dari pengertian diatas bahwa laporan biaya produksi dapat menunjukkan :

1. Biaya total dan biaya per unit dari perkerjaan yang diterima dari satu atau beberapa departemen lain.
2. Biaya total dan biaya per unit dari bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabrik yang ditambahkan oleh departemen tersebut.
3. Biaya dari persediaan barang dalam proses awal dan akhir.
4. Biaya yang ditransfer kedepartemen berikutnya atau ke persediaan barang jadi.

Adapun contoh laporan biaya produksi sebagai berikut :

Wells Manufacturing Company
Laporan biaya produksi
Untuk tahun yang berakhir 31 desember 19xx

Bahan Langsung		
Persediaan awal, 1 januari 19xx	\$16.000	
Pembelian bahan langsung	<u>55.000</u>	
Biaya bahan langsung yang tersedia untuk digunakan	\$77.000	
Persediaan akhir, 31 desember 19xx	<u>32.000</u>	
Bahan langsung yang digunakan		\$39.000
Tenaga kerja manufaktur langsung		<u>10.000</u>
Biaya overhead manufaktur:		
Tenaga kerja manufaktur tidak langsung	\$ 5.000	
Perlengkapan	33.000	
Pemanas, listrik, dan tenaga	28.000	
Penyusutan bangunan pabrik	3.000	
Penyusutan peralatan pabrik	2.500	
Lain-lain	<u>1.000</u>	
Total biaya overhead manufaktur		<u>\$ 72.000</u>
Total biaya manufaktur yang terjadi tahun 19xx		\$121.500
Persediaan barang dalam proses awal, 1 januari 19xx		<u>40.000</u>
Biaya manufaktur total untuk diperhitungkan		\$161.500
Persediaan barang dalam proses akhir, 31 desember 19xx		<u>31.000</u>
Total Biaya Produksi		<u><u>\$130.500</u></u>

Sumber : L.G Rayburn, akuntansi biaya hal 41.

a. Metode Harga Pokok Pesanan

Harga pokok produksi berkaitan dengan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Untuk mengakumulasikan ketiga jenis biaya tersebut dengan metode harga pokok pesanan, peranan formulir sebagai media pencatatan dan bukti transaksi sangat penting. Tiga formulir yang sangat umum digunakan dalam metode harga pokok pesanan yaitu :

- a) Kartu Biaya Pesanan
- b) Kartu Permintaan Bahan
- c) Kartu Waktu Keraja .

2. Metode Harga Pokok Proses

Laporan biaya produksi untuk perusahaan yang melakukan proses produksi yang secara masal dan kesinambungan, laporan biaya produksinya (*cost of production report*) memuat tiga bagian yaitu:

1. *Quantity schedule (unit report)*
2. *Cost schedule (cost report)*
3. *Cost recapitulation* (rekapitulasi / biaya)

Quantity schedule merupakan pernyataan yang menggambarkan jumlah produksi setiap departemen, jumlah yang dikirim kedepartemen berikutnya, jumlah yang belum siap di satu departemen, jumlah yang hilang (susut) satu departemen dan jumlah yang dikirim ke gudang.

Cost schedule menggambarakn dengan jelas total biaya tiap departemen dan biaya per unit baru ouput dari *finish goods*. Sedangkan *cost recapitulation* menggambarkan biaya dari produksi dan biaya produksi yang masih dalam proses pekerjaan (*work in process*).

Dalam perusahaan industri, produk yang dimulai pada awal bulan tidak selamanya siap pada akhir bulan. Unsur-unsur biaya produksi yang telah dipakai untuk mengolah produk yang masih dalam proses pada akhir periode, pada umumnya dapat menghasilkan produk yang tingkat penyelesaiannya tidak sama. Oleh karena itu *unit equivalen* untuk setiap unsur biaya produksi tidak sama. Untuk menghitung produksi *unit equivalen* tersebut, digunakan rumus sesuai dengan rumus yang dikemukakan oleh Matz dan Usry (1998:71) sebagai berikut:

$$\textit{Equivalen production} = \text{Jumlah yang benar-benar siap} + \text{WIP akhir} \times \% \text{ siap}$$

Berdasarkan rumus yang ditetapkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa produk *equivalen* merupakan jumlah yang benar-benar telah siap ditambah dengan barang yang masih dalam proses dikali dengan persentase penyelesaian.

Produk dalam proses yang ada pada akhir periode akan menjadi persediaan awal dalam proses pada periode berikutnya. Karena WIP awal periode membawa harga pokok dari periode sebelumnya maka akan timbul dua macam harga pokok dalam satu departemen, yaitu harga pokok sekarang dan harga pokok periode yang lalu. Dengan menggunakan rumus diatas, maka dapat dihitung biaya per unit pada masing-masing departemen untuk masing-masing unsur biaya produksi.

Akan tetapi jika ada unit yang hilang dalam departemen setelah departemen yang pertama, maka biaya unit yang hilang dapat dihitung dengan dua metode yaitu:

1. Menetapkan biaya per unit baru untuk pekerjaan yang diselesaikan pada departemen yang terdahulu dan kemudian mengurangi angka ini dengan biaya per unit lama dari departemen yang terdahulu.
2. Menetapkan bagian dari biaya total yang harus ditanggung oleh unit-unit yang hilang dan mengalokasikan biaya ini pada sisa unit yang utuh.

Penyusutan terhadap biaya unit yang hilang ini, tercantum dalam laporan biaya produksi sebagai “penyesuaian unit yang hilang”. Angka produksi ekuivalen tersebut diatas mencerminkan jumlah unit yang ditaksir telah selesai selama satu periode yang biasanya dinyatakan dalam satu rasio.

Pada kenyataan kesulitan yang sering dihadapi oleh perusahaan untuk menetapkan metode harga pokok proses ini adalah karena sulitnya untuk menentukan tingkat kesiapan (*unit equivalen*) suatu produk. Tingkat kesiapan ini sangat diperlukan untuk menghitung harga pokok barang yang diproduksi, kesalahan dalam memperkirakan tingkat kesiapan akan berpengaruh terhadap harga pokok barang yang dihasilkan.

J. Pandangan Islam Tentang Produksi

Ekonomi islam menempatkan *self interest* dan *social interest* sebagai tujuan, serta keadilan ekonomi, jaminan social, dan pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental sistem ekonomi. Untuk menjamin terwujudnya

94. Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain, Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj[892] itu Porang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, Maka dapatkah Kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara Kami dan mereka?"

95. Dzulkarnain berkata: "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, Maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka,

96. Berilah aku potongan-potongan besi". hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulkarnain: "Tiuplah (api itu)". hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata: "Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu".

97. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melobanginya.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya PT.Perkebunan Nusantara V

PT. Perkebunan Nusantara V merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perkebunan yang berdiri pada tanggal 11 Maret 1996 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP II, PTP IV, dan PTP V yang terletak di provinsi Riau. Perusahaan ini dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.10 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996. tentang penyetoran modal Negara RI untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara V. Anggaran dasar Perusahaandibuat di depan Notaris Harun Kamil SH No.38 tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 disahkan melalui keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-8333 H. T. 01. 1996, dan tambahan berita Negara RI No.8565 / 1996. Anggaran dasr perusahaan telah mengalami peruahan, terakhir dengan akta Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH No. 01 / 2002 tanggal 01 Oktober 2002. perusahaan ini telah dapat persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM RI melalui Surat Keputusan (SK) No. C-20923. HT. 01. 04. TH. 2002 tanggal 08 Oktober 2002, dan telah diumumkan dalam berita Negara RI No.75 tanggal 19 September dan tambahan berita Negara RI No. 8785 / 2003.

Sacara efektif, perusahaan mulai beroperasi sejak tanggal 09 April 1996, yaitu dengan dilantiknya Direksi dan Dewan komisaris secara lengkap oleh Menteri Pertanian RI. Saat ini Kantor Pusat Perusahaan berkedudukan d Jl. Rambutan No.43 Pekanbaru, dengan unit-unit usaha yang tersebar di berbagai Kabupaten di Provinsi Riau dan Kantor Perwakilan di Jl. Minangkabau No. 48 Jakarta Selatan. Dari tahun

2006 sampai sekarang , perusahaan mengelola 51 unit kerja yang terdiri dari 1 unit Kantor Pusat, 7 unit Strategi Bisnis, 26 unit Kebun Inti / Plasma, 12 Pabrik Kelapa Sawit, 3 Fasilitas Pengelola Karet dan 3 Rumah Sakit, 1 unit Palm Kernal Oil. Areal yang dikelola oleh perusahaan seluas 158.813 Ha, yang terdiri dari 80.116 Ha lahan sendiri / inti dan 74.497 Ha lahan Plasma, dan 7.200 Ha lahan KKPA. PT.Perkebunan Nusantara V memiliki visi dan misi, adapun visi dan misinya adalah :

Visi adalah “ Menjadi perusahaan perkebunan yang tangguh, mampu tumbuh dan berkembang dalam persaingan global “

Misi adalah “ Mengelola agroindustri kelapa sawit dan karet secara efisien bersama mitra untuk kepentingan stakeholder, berwawasan lingkungan, unggul dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi “.

Selain visi dan misi perusahaan juga mengusung nilai-nilai yang menjadi motivasi bagi seluruh anggota internal perusahaan. Selain itu perusahaan juga mengelola bisnis secara transparan, menjaga kepercayaan yang telah diperoleh dari pemegang saham dan pihak-pihak yang terkait. Sampai saat ini karyawan perusahaan berjumlah 16.073 orang. Sebagai perusahaan yang bergerak disektor industri hulu yang mengedepankan padat karya Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal penting bagi perusahaan. Iklim usaha yang terus berubah mendorong perusahaan untuk meningkatkan mutu SDM agar tetap bersaing di pasar global.

Setiap perusahaan pasti juga memiliki logo atau lambang yang memiliki makna tersendiri bagi perusahaan tersebut. Gambar logo PT. Perkebunan Nusantara V adalah:



Seperti yang terlihat di atas, maka dapat didefinisikan secara garis besar makna logo PT.Perkebunan Nusantara V, yaitu :

1. Tiga helai daun kecambah kelapa sawit melambangkan PT.Perkebunan Nusantara V terbentuk sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP asal, yaitu PTP II, PTP IV, dan PTP V yang berdomisili di Provinsi Riau.
2. Warna kuning pada daun kecambah kelapa sawit melambangkan hasil produksi PT.Perkebunan Nusantara V yaitu CPO (Crude Palm Oil).
3. Lima akar kecambah kelapa sawit melambangkan PT.Perkebunan Nusantara V yang baru tumbuh dan terus berkembang.
4. Lingkaran yang betuliskan PT.Perkebunan Nusantara V menggambarkan kesatuan dan persatuan yang menyeluruh.
5. Warna hijau menggambarkan ruang lingkup usaha adalah di bidang pertanian/ perkebunan.

B. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan proses menetapkan dan mengelompokkan pekerjaan yang akan dilakukan, merumuskan dan melimpahkan tanggung jawab an wewenang dengan maksud untuk memungkinkan organisasi bekerja dengan efektif dan efisien.

Organisasi sebagai sarana bagi perusahaan untuk pencapaian tujuan, harus disusun dengan tepat, cermat serta teliti sehingga dapat mendukung segala aktivitas perusahaan. Dengan adanya organisasi sebuah perusahaan menjadi tempat atau sarana untuk melakukan aktivitas perusahaan dan tidak terjadinya pemupukan tugas terhadap masing-masing fungsi dalam perusahaan tersebut. Cerminan agar garis perintah tugas, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab digambarkan dalam struktur organisasi.

Di dalam struktur organisasi terdapat gambaran mengenai pembagian kerja dan hubungan kerja sama antar fungsi-fungsi, bagian-bagian maupun orang dengan kedudukan, tugas, wewenang serta tanggung jawab yang berbeda serta kepada siapa bertanggung jawab untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penanganan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya pada suatu perusahaan.

Struktur organisasi yang tepat sangat membantu mengembangkan kerja sama dan mempersiapkan suatu rangka dasar pekerjaan, sehingga anggota organisasi dapat bekerja sama dengan efisien dan efektif dari sudut pandang manajemen yang baik, struktur organisasi garis mempunyai bentuk dan tujuan nyata serta mudah dipahami oleh setiap organisasi. Dengan demikian struktur organisasi tersebut akan berjalan dengan baik dalam membantu tercapainya tujuan organisasi secara umum.

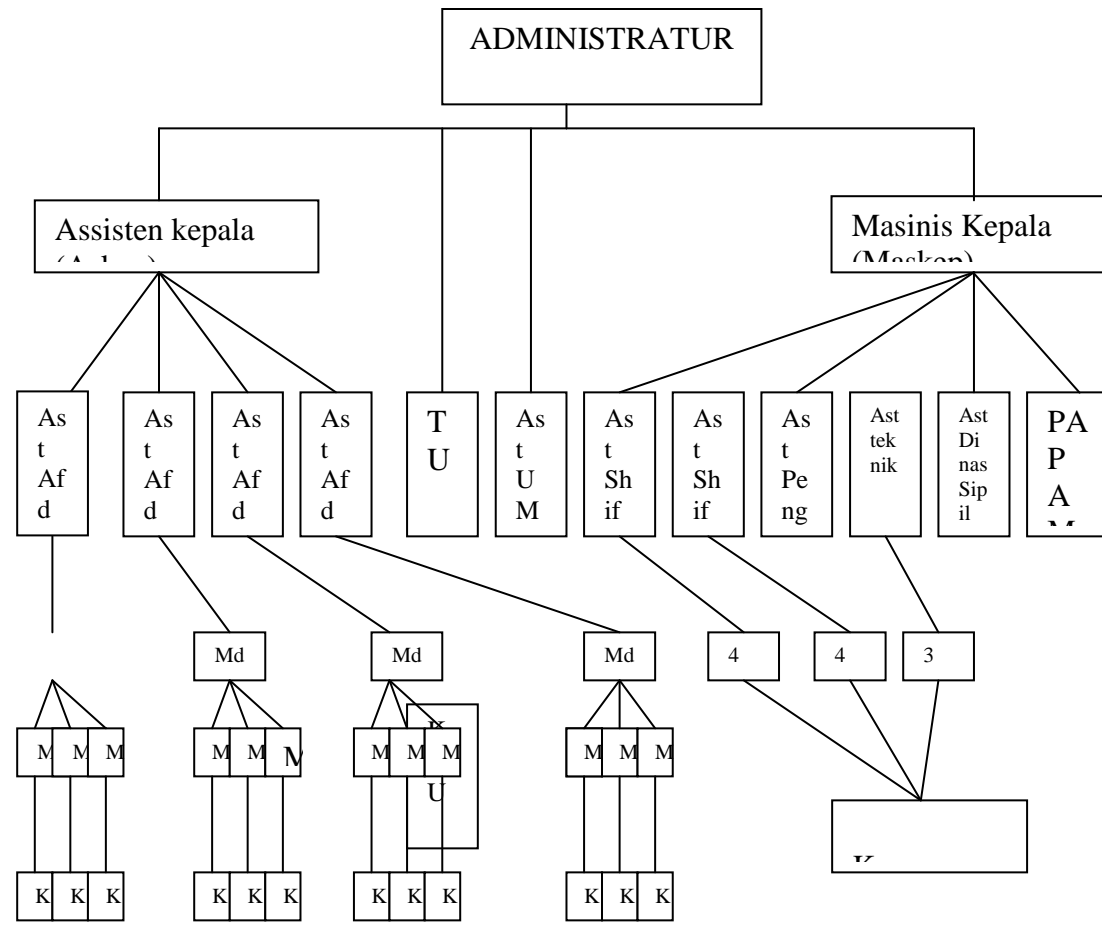
Menurut ahli manajemen seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antar kelompok kerja dan menetapkan tugas, wewenang, serta tanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat serta sesuai dengan keadaan kerja.

Jadi sangat jelaslah bahwa struktur organisasi sangat mendukung dan menentukan perkembangan suatu perusahaan. Struktur organisasi yang dipilih memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

Struktur organisasi yang diterapkan oleh PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru adalah Struktur Garis dan Staf (Lini dan Staf). Struktur organisasi garis dan staf merupakan penyempurnaan bentuk organisasi garis.

Bentuk organisasi ini digunakan karena perusahaan ini cukup besar dan memiliki wilayah kerja yang luas. Struktur organisasi yang dibuat sedemikian rupa agar perusahaan dapat menciptakan suatu kondisi kerjasama yang baik antar bagian dan saling mendukung untuk pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi tersebut.

Selama penulis melakukan penelitian, penulis ditempatkan di Bagian Akuntansi. Adapun struktur organisasi PT.Perkebunan Nusantara. Adapun struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara V adalah sebagai berikut :



C. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab

Adapun uraian tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan serta bagian di PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS ini berfungsi sebagai pengambilan keputusan tertinggi dalam PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru dan sbagai pusat pengawasan terhadap jalannya kegiatan perusahaan. RUPS ini dilakukan di Jakarta bersama Menteri Negara BUMN dan Direksi.

2. Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris sebagai berikut :

- a. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi dan pengolahan sepenuhnya dilaksanakan oleh para Direksi untuk kepentingan pemegang saham.
- b. Menetapkan kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan perusahaan agar kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan lancar.

Wewenang Dewan Komisaris adalah dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi.

Tanggung jawab Dewan Komisaris adalah :

- a. Menyampaikan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh para Direksi.
- b. Memeriksa laporan hasil kerja usaha perusahaan .

3. Direktur Utama

Direktur Utama memilki uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan strategis perusahaan sebagai mana dituangkan dalam rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan

(RKAP) dan rencana operasional lainnya, agar diperoleh sasaran kinerja dan tujuan dalam mencapai visi dan misi PTPN V.

- b. Merencanakan, membina dan mengembangkan efektivitas dan efisiensi organisasi perusahaan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Memelihara dan mengelola kekayaan perusahaan berdasarkan prinsip, peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pengawasan untuk pengamanan dan pembinaan kekayaan perusahaan dalam arti luas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Wewenang Direktur Utama adalah sebagai berikut :

- a. Bertindak sebagai pimpinan umum perusahaan, mengkoordinir kegiatan anggota direksi dalam mengendalikan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Membina efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Biro Stuan Pengawas Intern.

Tanggung jawab Direktur Utama adalah menyiapkan dan menyajikan laporan hasil kerja usaha perusahaan yang merupakan neraca dan daftar laba/rugi serta laporan lainnya secara berkala kepada pemegang saham.

4. Direktur Produksi, Keuangan, Pemasaran, & Renbang dan SDM

Empat direktur ini hanya beda pada bagiannya saja, yaitu bagian Produksi, Keuangan, Pemasaran & Renbang dan SDM, tapi mereka memiliki uraian tugas, wewenang, tanggung jawab yang sama.

Uraian tugas Direktur Produksi, Keuangan, Pemasaran & Renbang dan SDM adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan serta menetapkan kebijakan strategis dan operasional sesuai rencana untuk pencapaian sasaran kinerja dan tujuan perusahaan.
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penggunaan anggaran yang disediakan direktorat serta menindak lanjuti hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain untuk kepentingan perusahaan.

Wewenang dari Direktur Produksi, Keuangan, Pemasaran & Renbang dan SDM adalah membimbing dan mengembangkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia.

Tanggung jawab Direktur Produksi, Keuangan, Pemasaran & Renbang dan SDM adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan, menyusun dan mengembangkan organisasi sesuai kebutuhan dan kepentingan perusahaan.
- b. Menyiapkan dan menyajikan laporan kemajuan / hasil kerja untuk laporan direksi kepada pemegang saham, dewan komisaris maupun instansi terkait lainnya.

5. Kepala Bagian

Kepala Bagian memiliki tugas untuk menyusun rencana dan strategi perusahaan dibidang satuan pengawasan Intern untuk jangka waktu lima tahun (RJP 5 tahun) serta menyusun lebih rinci RJP 5 tahun tersebut ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya.

Wewenang Kepala Bagian adalah untuk mengidentifikasi seluruh aspek kegiatan perusahaan, untuk kemudian berdasarkan data yang terkait melakukan analisis untuk menentukan kemungkinan terjadinya ketidak efisienan, penyimpangan dan ketidak wajarannya. Berdasarkan hal tersebut ditentukan prioritas kemungkinan yang dapat di waspadai.

Tanggung jawab Kepala Bagian adalah untuk menyusun prosedur dan kebijakan di lingkungan.

6. Kepala Urusan

Kepala Urusan memiliki uraian sebagai berikut :

- a. membuat kajian tentang perusahaan.
- b. Membuat evaluasi dan uji kelayakan.
- c. Bekerja sama dengan Kepala Bagian untuk melakukan evaluasi terhadap perancangan dan pengembangan.

Wewenang dari Kepala Urusan adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada perusahaan melalui Kepala Bagian.

Tanggung jawab Kepala Urusan adalah :

- a. Menerima tugas-tugas dengan segala kebijakan pelaksanaannya dari kepala bagian dan menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas tersebut kepada Kepala Bagian.
- b. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Bagian / Kebun.

7. Asisten

Asisten memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menilai prestasi kerja karyawan bawahannya dan mengajukan penilaian karyawannya tersebut ke Kepala Urusan dan Kepala Bagian.

- b. Memeriksa laporan harian produksi.
- c. Menjalankan kegiatan-kegiatan atas perintah Kepala Urusan dan Kepala Bagian.

Wewenang Asisten adalah

- a. Melakukan pengawasan terhadap kerja karyawan anggota.
- b. Berhak menandatangani surat-surat yang dianggap penting apabila Kepala Urusan tidak ada ditempat.

Tanggung jawab Asisten adalah menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Urusan.

D. Aktifitas Kantor Pusat PT. Perkebunan Nusantara V

Sebagaimana yang penulis jelaskan pada sejarah singkat PT. Perkebunan Nusantara V, bahwa PTPN merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan. Komoditas andalan yang di usahakan perusahaan adalah kelapa sawit dan karet. Selain itu, mulai tahun 1999 perusahaan mulai menanam sagu. Pada tahun 2001 komoditi kakao dikonvensa ke komoditi kelapa sawit.

Perusahaan mengolah agroindustri kelapa sawit dan karet serta mengolah hasilnya menjadi CPO, inti sawit, dan berbagai jenis produk karet. Semua hasil produksi dijual ke pasar local maupun ekspor. Untuk mendukung pemasaran perusahaan bersama seluruh BUMN Perkebunan membentuk Kantor Pemasaran Bersama (KPB) PTPN I-XIV yang berkedudukan di Jakarta dan juga indoham Jerman.

Salah satu yang mendukung aktifitas yang dilakukan oleh PTPN V dengan cara mengelolah bisnis secara transparan, menjaga kepercayaan yang telah diperoleh dari pemegang saham dan pihak-pihak terkait. Secara bertahap perusahaan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, bukan hanya sebagai kewajiban tetapi merupakan kebutuhan dalam memelihara keberlangsungan pertumbuhan usaha.

Berbagai langka dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah mulai dilingkungan perusahaan, melalui :

1. Trasparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekana dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban unit sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban, kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan dalam menjalankan operasinya tidak semata-mata bertujuan memenuhi kepentingan pemegang saham (*stekholder*), namun juga memperhatikan keseklarasan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). Manajemen berkeyakinan bahwa eksistensi dan operasi perusahaan harus memberi manfaat bagi para stakeholdernya. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat diwujudkan melalui :

- a. Bina lingkungan, sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat tempatan dan sekaligus membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan serta mengurangi kesenjangan social. Bentuk bantuan bina lingkungan yang diberikan kepada masyarakat dilingkungan perusahaan di berikan bagi sector pendidikan, sertor kerohanian, sekror kesehatan,sector olahraga, sector kesenian, bantuan untuk bencana alam dan infrastuktur.
- b. Protek Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA), sesuai misi perusahaan untuk meningkatkan kemitraan dengan petani, perlu perhatian terpusat ke bidang stabilitas dan pamarataan pembangunan, maka sasaran yangingin dicapai adalah membangun kebun kelapa sawit pola KKPA dengan kelembagaan koperasi sejumlah 12 KUD, dan telah terealisirhingga tahun 2007 seluas 7.200 Ha.
- c. Petani plasma, hubungan antara perusahaan dan petani telah berlangsunglama dalam mengelolabisnis kelapa sawit. Perusahaan memberikan pembinaan manajemen dan bantuan teknis kepada petani plasma sekitar kebun. Keberadaan perusahaan merupakan salah satu faktor dalam meraih sukses dan memberikan standar kehidupan yang lebih baik bagi petani. Pada tahun 2004

sekitar 28.341 KK petani kelapa sawit dan 10.331 KK petani karet turut serta dalam mengelola areal kebun seluas 74.526 Ha. Pada tahun yang sama perusahaan juga mengembangkan Rp. 566 M bagi pembelian TBS petani plasma.

- d. Proyek Siak, perusahaan mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (PemKab) Siak dalam program pembangunan kebun kelapa sawit bagi masyarakat setempat. Peroyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran serta merupakan nilai tambah bagi masyarakat di Kabupaten Siak.
- e. Pengelolaan lingkungan hidup, dalam menjalankan operasinya, perusahaan mengupayakan teknologi yang lebih bersih dan ramah lingkungan pada setiap kegiatan produksi.
- f. Keselamatan Kerja, perusahaan mengembangkan manajemen keselamatan kerja melalui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Untuk memastikan efektifitas pelaksanaan sistem tersebut. Perusahaan melaksanakan audit SMK3 secara berkala, baik internal maupun dengan mengundang auditor eksternal (dari PT. Sucifindo). Hasil audit eksternal telah membuahkan hasil berupa sertifikat emas tahun 2004 disampaikan oleh Wakil Presiden M. Jusup Kalla kepada delapan PKS di lingkungan perusahaan.
- g. Manajemen Mutu, perusahaan menetapkan ISO 9001 ssebagai upaya untuk meningkatkan mutu hasil produksi, secara terus menerus perusahaan melaksanakan revisi dokumen, annual, prosedur dokumen pendukung ISO 9001 : Versi 2000

- h. Kesejahteraan Karyawan dan Pensiun, perusahaan tidak memberlakukan karyawan sebagai factor produksi, namun sebagai mitra dalam menjalankan operasi perusahaan. Melalui wadah Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun), karyawan melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKS) dengan perusahaan,. Kesejahteraan karyawan menjadi salah satu perhatian utama. Perusahaan, melalui penyediaan fasilitas kerja, peribadatan, olahraga, dan pendidikan bagi keluarga perusahaan. Perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan berupa klinik di tiap kebun dan tiga rumah sakit perusahaan, serta menjaminkerja sama dengan RS Swasta maupun Pemerintah. Perusahaan menyediakan paket remunerasi yang kompetitif karyawan. Selain gaji di atas Upah Minimum Regional Propinsi (UMR), perusahaan menyediakan tunjangan perumahan, tunjangan rekreasi, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Perusahaan juga mengikutsertakan karyawan dalam program asuransi jiwa / kecelakaan dan jamsostek. Program pension yang diikuti oleh karyawan adalah program manfaat pasti (*definet benefit*) yang memiliki kondisi keuangan yang bagus.
- i. PUKK / Kemitraan, pembangunan berkelanjutan yang dilakukan bagi masyarakat setempat sebagai bagian sosio-eko nasional seiring dengan prinsip ekonomi Kerakyatan. Setiap tahunnya perusahaan menempatkan 2%-3% dari keuntungan bersih setelah pajak untuk memberikan bantuan secara aktif (mulai keahlian manajemen sampai aspek teknis) sebagaimana dipersyaratkan RUPS bagi pembantu pengusaha kecil setempat / koperasi.

Disamping mengelola kebun sendiri, perusahaan juga bermitra usaha dengan petani plasma, yaitu melakukan pembelian hasil produksi. Kebun plasma berupa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dan cup lump karet dari 7 kebun plasma. Untuk

pengolahan produksi, perusahaan memiliki 12 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan 3 unit pabrik pengolahan karet. Untuk fasilitas kesehatan perusahaan memiliki 3 unit Rumah Sakit.

Sejak tahun 2000 perusahaan menambah kontribusi langsung kepada masyarakat melalui pembangunan kebun plasma kelapa sawit pola KKPA. Direncanakan mencapai luas 36.330 Ha untuk 18.165 KK yang bergabung dalam 13 KUD, dan tersebar di Provinsi Riau. Secara administratif, wilayah kerja perusahaan terletak di 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Biaya tidak langsung atau biaya overhead pada umumnya didefinisikan sebagai biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung atau semua biaya produksi tidak langsung.

Pembebanan biaya overhead pabrik oleh perusahaan, menggunakan metode biaya yang sesungguhnya terjadi. Penggunaan biaya sesungguhnya memang sesuai dengan standar akuntansi, akan tetapi pada banyak hal sulit menentukan pembebanannya pada barang jadi. Namun walaupun demikian, pembebanan biaya overhead pabrik dengan dasar tarif yang ditetapkan dimuka masih tetap dianjurkan, karena bisa menentukan tarif biaya overhead yaitu dengan membagi biaya taksiran dengan taksiran kapasitas produksi.

Biaya produksi tidak langsung dikeluarkan untuk macam-macam biaya yang berhubungan dengan proses produksi. Biaya-biaya ini meliputi biaya umum pabrik dan biaya penyusutan pabrik. Penggolongan dan pembebanan semua biaya tidak langsung telah digolongkan kedalam biaya pabrikasi, tetapi sebenarnya tidak semua biaya tersebut dapat digolongkan kedalam biaya tidak langsung.

A. Biaya Pemeliharaan Bangunan Pabrik

Menurut standar akuntansi keuangan, semua biaya dikorbankan untuk memproduksi suatu barang harus diperhitungkan keharga pokok produksi tersebut. Dalam hal biaya pemeliharaan bangunan, perusahaan menggabungkan biaya

pemeliharaan bangunan pabrik dan biaya pemeliharaan bangunan kantor dan dilaporkannya sebagai penambahan biaya tidak langsung sebesar Rp 4,,772,792,410.

Rincian biaya pemeliharaan bangunan pabrik dapat dilihat pada tabel IV.I.

Tabel IV.1 : Biaya Pemeliharaan Bangunan Pabrik per 31 Desember 2009

No	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Gedung Kantor	Rp 2,715,718,881
2.	Gudang	Rp 1,030,923,161
3.	Bengkel	Rp 1,026,150,368
	JUMLAH	Rp 4,772,792,410

Sumber : PTPN V (Persero) Pekanbaru

Adapun jurnal yang dibuat perusahaan adalah :

BOP – Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp 2,715,718,881
BOP – Biaya Pemeliharaan Gudang	Rp 1,030,923,161
BOP _ Biaya Pemeliharaan Bengkel	Rp 1,026,150,368
 Kas	 Rp 4,772,792,410

Kesalahan pembebanan biaya pemeliharaan bangunan pabrik yang disajikan dalam biaya tidak langsung mengakibatkan jumlah biaya tidak langsung yang dilaporkan menjadi tidak wajar sehingga harga pokok produksi menjadi tinggi. Seharusnya biaya pemeliharaan bangunan kantor dibebankan pada biaya operasi sebagai biaya umum kantor sebesar Rp 2,715,718,881, sedangkan biaya pemeliharaan bangunan yang dibebankan ke pabrik adalah sebesar Rp 2,057,073,529. Seharusnya jurnal yang dibuat perusahaan adalah sebagai berikut :

Biaya Umum Kantor –	Rp 2,715,718,881
Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	
BOP – Biaya Pemeliharaan Gudang	Rp 1,030,923,161
BOP – Biaya Pameliharaan Bengkel	Rp 1,026,150,368
 Kas	 Rp 4,772,792,410

Agar pencatatan perusahaan menunjukkan catatan dan jurnal yang seharusnya, maka perlu dibuat jurnal koreksi sebagai berikut :

Biaya Umum Kantor –	Rp 2,715,718,881
Biaya pemeliharaan Gedung Kantor	
 Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	 Rp 2,715,718,881

Dari jurnal diatas belum terlihat pemindahan dari biaya tidak langsung kedalam harga pokok produksi. Jadi jurnal yang perlu dicatat perusahaan adalah sebagai berikut :

BDP – Biaya pemeliharaan gedung kantor	Rp 2,715,718,881
BDP – Biaya Pemeliharaan Gudang	Rp 1,030,923,161
BDP – Biaya Pemeliharaan Bengkel	Rp 1,026,150,368
 BOP – Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	 Rp 2,715,718,881
BOP – Biaya Pemeliharaan Gudang	Rp 1,030,923,161
BOP _ Biaya Pemliharaan Bengkel	Rp 1,026,150,368

B. Biaya Lain – Lain

Dalam menghitung biaya lain-lain, perusahaan mengelompokkan semua biaya lain-lain sebesar Rp18,409,515,940 kedalam . Riancian biaya lain-lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2 : Biaya Lain – Lain Per 31 Desember 2009

NO	KERERANGAN	JUMLAH
1.	Pers. kantor dan alat-alat tulis	Rp 5,706,949,941
2.	Buku, surat kabar dan majalah	Rp 1,159,799,504
3.	Biaya bank	Rp 128,866,612
4.	Biaya foto copy surat	Rp 36,819,032
5.	Biaya makan/minum rapat	Rp 717,971,122
6.	Biaya analisis	Rp 10,659,109,729
	JUMLAH	Rp 18,409,515,940

Sumber : PTPN V (Persero) Pekanbaru.

Pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan jurnal sebagai berikut :

BOP - Pers. Kantor dan alat-alat tulis	Rp	5,706,949,941
BOP – buku, surat kabar dan majalah	Rp	1,159,799,504
BOP – Biaya bank	Rp	128,866,612
BOP – Biaya Fotocopy surat	Rp	36,819,032
BOP – Biaya makan/ minum rapat	Rp	717,971,122
BOP – Biaya analisis	Rp	10,659,109,729

Kas	Rp	18,409,515,940
-----	----	----------------

Kesalahan pembebanan biaya lain-lain yang disajikan dalam biaya tidak langsung mengakibatkan Biaya tidak langsung menjadi lebih besar. Hal ini tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, seharusnya biaya lain-lain yang terjadi dikantor dibebankan pada biaya usaha sebagai biaya administrasi sebesar Rp 7,750,406,221 yang terdiri dari pers. kantor dan alat-alat tulis, buku surat kabar dan

majalah, biaya bank, biaya fotocopy surat, dan biaya makan/minum rapat. Sedangkan biaya lain-lain yang dibebankan hanya sebesar Rp 10,659,109,729.

Menurut pencatatan diatas dapat dilihat bahwa perusahaan masih menggabungkan biaya-biaya yang seharusnya dimasukkan kedalam biaya usaha sebagai biaya administrasi tetapi dicatat sebagai biaya tidak langsung. Pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan adalah dengan jurnal sebagai berikut :

By. administrasi - Pers. Kantor dan alat-alat tulis	Rp	5,706,949,941
By. administrasi – buku, surat kabar dan majalah	Rp	1,159,799,504
By. administrasi – Biaya bank	Rp	128,866,612
By. administrasi – Biaya Fotocopy surat	Rp	36,819,032
By. administrasi – Biaya makan/ minum rapat	Rp	717,971,122
BOP – Biaya analisis	Rp	10,659,109,729

Kas Rp 18,409,515,940

Untuk itu perlu dilakukan koreksi. Adapun jurnal koreksi yang dibuat sebagai berikut:

By. administrasi - Pers. Kantor dan alat-alat tulis	Rp	5,706,949,941
By. administrasi – buku, surat kabar dan majalah	Rp	1,159,799,504
By. administrasi – Biaya bank	Rp	128,866,612
By. administrasi – Biaya Fotocopy surat	Rp	36,819,032
By. administrasi – Biaya makan/ minum rapat	Rp	717,971,122
BOP - Pers. Kantor dan alat-alat tulis	Rp	5,706,949,941
BOP – buku, surat kabar dan majalah	Rp	1,159,799,504
BOP – Biaya bank	Rp	128,866,612
BOP – Biaya Fotocopy surat	Rp	36,819,032
BOP – Biaya makan/ minum rapat	Rp	717,971,122

Pemindahan jurnal dari pengelompokkan biaya tidak langsung kedalam harga pokok produksi adalah :

BDP – Pers kantor dan alat-alat tulis	Rp	5,706,949,941
BDP – Buku surat kabar dan majalah	Rp	1,159,799,504
BDP – Biaya bank	Rp	128,866,612
BDP – Biaya fotocopy surat	Rp	36,819,032
BDP – Biaya makan/minum rapat	Rp	717,971,122
BDP – Biaya analisis	Rp	10,659,109,729

BOP - Pers. Kantor dan alat-alat tulis	Rp	5,706,949,941
BOP – buku, surat kabar dan majalah	Rp	1,159,799,504
BOP – Biaya bank	Rp	128,866,612
BOP – Biaya Fotocopy surat	Rp	36,819,032
BOP – Biaya makan/ minum rapat	Rp	717,971,122
BOP – Biaya analisis	Rp	10,659,109,729

C. Biaya Penyusutan

Sama halnya dengan perlakuan terhadap biaya lain-lain, yaitu perusahaan menggabungkan seluruh biaya penyusutan aset tetap perusahaan sebesar Rp 41,360,033.919 kedalam biaya tidak langsung pabrik. Padahal terdapat biaya penyusutan aset tetap yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi yaitu biaya penyusutan rumah tinggal karyawan sebesar Rp 1,654,401,357 dan penyusutan bangunan kantor sebesar Rp 82,720,068. Akibat kesalahan dalam pebebanan biaya tidak langsung yang disajikan maka mempengaruhi tingginya harga pokok produksi. Daftar biaya prnyusutan aset tetap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3 : Biaya Penyusutan Aset Tetap Tahun 2009

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Rumah tinggal	Rp 1,654,401,358
2.	Bangunan perusahaan	Rp 82,720,068
3.	Mesin dan perlengkapan	Rp 37,637,630,886
4.	Jalan, jembatan dan saluran air	Rp 289,520,238
5.	Alat-alat pengangkut	Rp 703,120,557
6.	Alat pertanian dan inventaris	Rp 992,640,815
	JUMLAH	Rp 41,070,033,941

Sumber : PTPN V (persero) Pekanbaru.

Pencatatan yang dilakukan perusahaan adalah dengan jurnal sebagai berikut :

BOP – Biaya Peny. Rumah karyawan	Rp 1,654,401,358
BOP – Biaya peny. Bangunan kantor	Rp 82,720,068
BOP – Biaya peny. Mesin dan Perlengkapan	Rp 37,637,630,886
BOP – Biaya peny. Alat – alat pengangkut	Rp 703,120,557
BOP – Biaya peny. Alat pertanian dan inventaris	Rp 992,640,815

Akumulasi penyusutan Rp 41,070,513,703

Menurut pencatatan diatas dapat dilihat bahwa perusahaan masih menggabungkan biaya-biaya yang seharusnya dimasukkan kedalam biaya usaha tetapi dicatat sebagai biaya tidak langsung. Pencatatan yang seharusnya dilakukan adalah sebagai berikut :

Biaya usaha – Biaya peny. Rumah karyawan	Rp 1,654,401,358
Biaya usaha – Biaya peny. Bangunan kantor	Rp 82,720,068
BOP – Biaya Peny. Mesin dan perlengkapan	Rp 37,637,630,886
BOP – Biaya Peny. Alat – alat pengangkutan	Rp 703,120,557
BOP – Biaya Peny. Alat pertanian dan inventaris	Rp 992,640,815
 Akumulasi penyusutan	 Rp 41,070,513,703

Dilihat dari pencatatan yang dilakukan perusahaan, maka perlu dilakukan jurnal koreksi sebagai berikut :

Biaya usaha – Biaya peny. Rumah karyawan	Rp 1,654,401,358
Biaya usaha – Biaya peny. Bangunan kantor	Rp 82,720,068
 BOP – Biaya Peny. Rumah karyawan	 Rp 1,654,401,358
BOP – Biaya peny. Bangunan kantor	Rp 82,720,068

Pencatatan yang dilakukan perusahaan dalam pemindahan biaya tidak langsung kedalam harga pokok produksi adalah :

BDP – Biaya Peny. Rumah tinggal	Rp 1,654,401,358
BDP – Biaya Peny. Bangunan kantor	Rp 82,720,068
BDP – Biaya Peny. Mesin dan perlengkapan	Rp 37,637,630,886
BDP – Biaya Peny. Alat-alat pengangkutan	Rp 703,120,557
BDP – Biaya Peny. Alat pertanian dan inventaris	Rp 992,640,815
 BOP – Biaya Peny. Rumah karyawan	 Rp 1,654,401,358
BOP – Biaya peny. Bangunan kantor	Rp 82,720,068
BOP – Biaya peny. Mesin dan Perlengkapan	Rp 37,637,630,886
BOP – Biaya peny. Alat – alat pengangkut	Rp 703,120,557
BOP – Biaya peny. Alat pertanian dan inventaris	Rp 992,640,815

D. Asuransi Pabrik

Di dalam laporan harga pokok produksi yang disajikan oleh perusahaan terdapat biaya asuransi pabrik sebesar Rp 8,310,320,884 (Lampiran 15) yang

dimasukkan kedalam kelompok biaya langsung. Pengelompokkan asuransi pabrik ini tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan No. 14, karena biaya biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi atau biaya biaya selain biaya bahan baku langsung dan biaya biaya tenaga kerja langsung.

Kesalahan pengelompokkan asuransi pabrik yang disajikan dalam biaya langsung mengakibatkan biaya langsung yang disajikan menjadi lebih besar. Seharusnya biaya asuransi pabrik dikelompokkan kedalam biaya tidak langsung.

Jurnal yang dibuat perusahaan adalah :

BL – Asuransi Pabrik	Rp 8,310,320,884
Kas	Rp 8,310,320,884

Dari pencatatan diatas dapat dilihat bahwa perusahaan menyajikan asuransi pabrik kedalam biaya langsung, pencatatan yang seharusnya dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut :

BOP – Asuransi pabrik	Rp 8,310,320,884
Kas	Rp 8,310,320,884

Jurnal koreksi yang perlu dilakukan adalah

BOP – Asuransi pabrik	Rp 8,310,320,884
BL – Asuransi pabrik	Rp 8,310,320,884

Sedangkan asuransi yang terdapat kelompok biaya tidak langsung sebesar Rp2,114,880,613 dimasukkan kedalam beban asuransi. Kesalahan ini mengakibatkan biaya tidak langsung menjadi lebih tinggi. Perusahaan mencatat jurnal sebagai berikut :

BOP – Asuransi lain-lain	Rp2,114,880,613
--------------------------	-----------------

Kas	Rp2,114,880,613
-----	-----------------

Perusahaan menyajikan asuransi kedalam biaya tidak langsung, seharusnya pencatatan yang dilakukan perusahaan adalah :

Beban Asuransi – asuransi lain-lain	Rp2,114,880,613
-------------------------------------	-----------------

Kas	Rp2,114,880,613
-----	-----------------

Untuk itu perlu dilakukan koreksi terhadap jurnal diatas. Jurnal koreksi yang dicatat adalah sebagai berikut :

Beban asuransi – Asuransi lain-lain	Rp2,114,880,613
-------------------------------------	-----------------

BOP – Asuransi lain-lain	Rp2,114,880,613
--------------------------	-----------------

E. Laporan Harga Pokok Produksi

Melalui beberapa koreksi terhadap biaya tidak langsung (biaya overhead pabrik) maka dapat disusun laporan harga pokok produksi yang telah disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan. Laporan harga pokok produksi yang disusun setelah dianalisis akan menghasilkan harga pokok produksi yang berbeda dengan laporan harga pokok produksi yang disusun perusahaan ini. Berdasarkan analisis diatas, maka jelaslah bahwa dalam menentukan biaya tidak langsung perusahaan belum melakukannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan akibatnya dapat mempengaruhi harga pokok produksi yang akan diperoleh perusahaan.

Adapun jumlah biaya tidak langsung menurut perusahaan adalah Rp 295,606,755,919. Sedangkan setelah dianalisis jumlah biaya tidak langsung menjadi Rp 253,598,949,672. Untuk melihat perubahan biaya tidak langsung dapat dilihat pada tabel IV.4 dibawah ini :

Tabel IV.4 : Perbandingan Biaya Tidak Langsung Menurut Perusahaan dan Hasil Analisis Per 31 Desember 2009

KETERANGAN	Biaya tidak langsung menurut perusahaan	Biaya tidak langsung menurut analisis
Gaji dan tunjangan karyawan pimpinan	7,593,824,976	7,593,824,976
Gaji dan tunjangan karyawan pelaksana	66,335,685,980	66,335,685,980
Biaya lingkungan	46,442,468,25	46,442,468,25
Biaya pengangkutan dan perjalanan	82,621,611,719	82,621,611,719
Pemeliharaan bangunan rumah	845,417,701	845,417,701
Pemeliharaan bangunan perusahaan	4,772,792,410	2,057,073,529
Pemakaian inventaris kecil	3,551,310,862	3,551,310,862
Pajak dan sewa tanah	8,004,474,679	8,004,474,679
Asuransi pabrik	-	8,310,320,884
Asuransi	2,114,880,613	-
Biaya keamanan	7,809,642,388	7,809,642,388
Biaya penerangan	1,401,813,396	1,401,813,396
Biaya air	4,343,272,062	4,343,272,062
Biaya lain-lain	18,409,515,940	10,659,109,729
Biaya penyusutan	41,360,033,941	39,622,912,515
Jumlah Biaya Tidak Langsung	295,606,755,919	289,598,949,672

Sumber : Data Olahan

Penulis juga menyajikan laporan harga pokok produksi yang telah disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan. Harga pokok produksi menurut perusahaan adalah sebesar Rp 570,369,429,440. Sedangkan setelah dianalisis maka jumlah harga pokok produksi menjadi Rp 556,051,302,309. Berarti ada selisih sebesar Rp 6,007,806,247 yang diakibatkan oleh pengurangan biaya pemeliharaan bangunan perusahaan sebesar Rp 2,171,571,881, biaya lain-lain sebesar Rp 7,750,406,221, biaya penyusutan sebanyak Rp 1,737,121,326, penghapusan biaya asuransi sebesar Rp 2,114,880,613. Dan penambahan asuransi pabrik sebesar Rp 8,310,320,884. Tabel IV.5 dibawah ini menunjukkan laporan harga pokok produksi yang telah dianalisis.

Tabel IV.5 : Laporan Harga Pokok Produksi Per 31 Desember 2009

Biaya Langsung		
Gaji dan tunjangan non staf	Rp. 18,271,194,638	
Biaya pengolahan	Rp.127,306,216,640	
Pemeliharaan pabrik	Rp.119,657715,520	
Biaya pengepakan dan penimbunan	<u>Rp. 1,217,765,839</u>	
Jumlah Biaya Langsung		Rp 266,452,352,637
Biaya Tidak Langsung		
Gaji dan tunjangan karyawan pimpinan	Rp. 7,593,824,976	
Gaji dan tunjangan karyawan pelaksana	Rp. 66,335,685,980	
Biaya lingkungan	Rp. 46,442,468,252	
Biaya pengangkutan dan perjalanan	Rp. 82,621,611,719	
Pemeliharaan bangunan rumah	Rp. 845,417,701	
Pemeliharaan bangunan perusahaan	Rp. 2,075,073,529	
Pemakaian inventaris kecil	Rp. 5,551,310,862	
Pajak dan sewa tanah	Rp 8,004,474,679	
Asuransi pabrik	Rp. .8,310,320,884	
Biaya keamanan	Rp. 7,809,642,388	
Biaya penerangan	Rp. 1,401,813,396	
Biaya air	Rp. 4,343,272,062	
Biaya lain-lain	Rp. 10,659,109,729	
Biaya penyusutan	<u>Rp. 39,622,912,515</u>	
Jumlah Biaya Tidak Langsung		<u>Rp 289,598,949,672</u>
		Rp 556,051,302,309
Total Biaya		
Produksi		

Sumber : Data Olahan

Dari hasil analisis harga pokok produksi sebesar Rp 556,051,302,309 menunjukkan adanya selisih sebesar Rp 6,007,806,247 . Hal ini akan mempengaruhi besarnya laba kotor yang terjadi pada perusahaan. Laba kotor perusahaan akan meningkat sebesar selisih pada harga pokok produksi. Untuk melihat perubahan pada laba kotor perusahaan dapat dilihat pada tabel IV.6 dibawah ini :

Tabel IV.6 : Laporan Laba/ Rugi Per 31 Desember 2009

Pendapatan Penjualan Ekspor dan Lokal		1,611,619,379,086
Harga Pokok Penjualan		
Persediaan Awal	234,187,043,298	
Harga Pokok Produksi	556,051,302,309	
Persediaan Akhir	<u>(132,045,504,925)</u>	
Total Harga Pokok Penjualan		<u>(658,192,840,682)</u>
Laba Kotor		953,426,538,404
Biaya Usaha		
Biaya Penjualan	92,284,088,477	
Biaya Administrasi	498,746,507,645	
Biaya Bunga	<u>71,051,186,022</u>	
Total Biaya Usaha		<u>(662,081,782,144)</u>
Laba/Rugi Setelah Biaya Usaha		291,344,756,260
Pendapatan (Biaya) Lain-Lain		<u>(13,410,661,910)</u>
Laba/ Rugi Sebelum Pajak		277,934,094,350

Sumber : Data Olahan.

Sebelumnya laba kotor perusahaan adalah Rp 939,108,411,273. Setelah dianalisis laba kotor perusahaan meningkat menjadi Rp 953,426,538,404. Perubahan tersebut akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan laba/rugi tersebut. Oleh sebab itu perusahaan harus lebih memperhatikan lagi bagaimana perhitungan atau pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menyimpulkan bagaimana penentuan biaya tidak langsung oleh perusahaan dan memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi perusahaan dimasa akan datang. Kesimpulannya antara lain :

1. Perusahaan mencatat secara keseluruhan biaya pemeliharaan bangunan yang terdiri dari pemeliharaan gedung kantor, gudang dan bengkel kedalam biaya tidak langsung.
2. Perusahaan mengelompokkan semua pengeluaran lain-lain kedalam biaya tidak langsung.
3. Dalam menghitung biaya penyusutan, perusahaan mengakui seluruh biaya penyusutan aset tetap kedalam biaya tidak langsung pabrik, padahal terdapat aset tetap yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi yaitu penyusutan rumah tinggal dan penyusutan bangunan kantor.
4. Perusahaan menggabungkan asuransi pabrik kedalam biaya langsung, seharusnya asuransi pabrik tersebut dimasukkan kedalam biaya tidak langsung. Dan asuransi yang terdapat pada kelompok biaya tidak langsung dimasukkan kedalam beban asuransi.

5. Perubahan yang terjadi pada biaya tidak langsung, mengakibatkan harga pokok produksi rendah dan laba/rugi menjadi tinggi.
6. Dalam penentuan biaya tidak langsung perusahaan tidak mencatat sesuai dengan standar akuntansi keuangan No. 14.

B. Saran

1. Seharusnya perusahaan mengalokasikan biaya pemeliharaan gedung kantor kedalam beban operasi.
2. Sebaiknya perusahaan tidak menggabungkan seluruh pengeluaran lain-lain kedalam biaya pabrik karena terdapat biaya yang dikeluarkan untuk fungsi administrasi kantor yang terdiri dari persediaan kantor dan alat-alat tulis, buku surat kabar dan majalah, biaya bank, biaya fotocopy surat, dan biaya makan/minum rapat.
3. Seharusnya perusahaan mengalokasikan biaya penyusutan rumah tinggal dan penyusutan bangunan kantor kedalam beban operasi.
4. Seharusnya perusahaan menggabungkan asuransi pabrik kedalam biaya tidak langsung. Dan asuransi lain-lain dimasukkan kedalam beban asuransi
5. Dalam menentukan biaya tidak langsung sebaiknya perusahaan melakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan No.14, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an surat Al-Kahfi ayat 92-97

Efendi Rustam, 2001, *kajian –kajian islam*, Surabaya : Bumi Putra.

Hansen dan Mowen, 2004, *manajemen Accounting*, Edisi Ke Tujuh, Jakarta:
Salemba Empat

Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Standar Akuntansi Keuangan*, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta.

Blocher, Edward J King. H Chen, Thomas Lin, 2001, *Manajemen Biaya*. Penerjemah A.Susty Ambaraini, Buku dua, Jakarta : Salemba Empat.

Milton F Usry & Hamer, 2004, *Akuntansi Biaya*, Edisi 10. Jakarta : Erlangga

_____ , 2006 *Akuntansi Biaya*, Edisi 13. Jakarta : Erlangga

Hariadi, Bambang, 2002, *Akuntansi Manajemen (suatu sudut pandang)*. Yogyakarta :BPEF

Hongren T Charles, 2001, *Akuntansi Biaya edisi 1*. Jakarta : Erlangga.

Kholmi masiyah ningsih, 2004. *Akuntansi Biaya*. Universitas muhammadiyah Malang

Mulyadi, 2000, *Akuntansi Biaya edisi 5*. Yogyakarta : Aditya media

_____ ,1998. *Akuntansi Manajemen edisi 2*. Yogyakarta : Adytia media.

Munandar M, 2001, *Budgeting (Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja)*. Yogyakarta :Erlangga.

Niswonger Rollin dkk. 2000. *Prinsip-Prinsip Akuntansi*, Jakarta :Penerbit Erlangga

Samril L,M, 2001. *Akuntansi Manajemen Suatu Pengantar edisi pertama jilid pertama*. Jakarta : Erlangga.

Handoko, 2002, *Biaya Produksi edisi kedua*, Yogyakarta :BPEF

Kotler Dkk, 2006, *Pengantar Bisnis*, Jakarta : Penerbit Erlangga.

Simamora, Henry, 2000, *Akuntansi Manajemen*, edisi pertama, Jakarta : Salemba Empat

Supriono, R, A, 2003, *Akuntansi Biaya, Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok*, Buku pertama edisi kedua, Yogyakarta : BPEF.

Sulastiningsih, Zulkifli, 2000, *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta : UPPAMP YKPN.

Stice skousen, 2004. *Intermediate Accounting*, buku pertama edisi 15, Jakarta : salemba empat.

Kieso, Weygandt, Warfield, 2002, *Akuntansi intermediate*, Jakarta: Erlangga.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Biaya Pemeliharaan Bangunan Pabrik per 31 Desember 2009. ...	58
Tabel IV.2	Biaya Lain-lain per 31 Desember 2009.	60
Tabel IV.3	Biaya Penyusutan per 31 Desember 2009.	63
Tabel IV.4	Perbandingan Biaya Tidak Langsung Menurut Perusahaan dan Hasil Analisis per 31 Desember 2009.	67
Tabel IV.5	Laporan Biaya Produksi Menurut Hasil Analisa per 31 Desember 2009.	69
Tabel IV.6	Laporan Laba/Rugi Per 31 Desember 2009.	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Siklus Pembuatan Produk.	30
Gambar II.2	Siklus Akuntansi Biaya.	31
Gambar II.3	Aliran Biaya Produksi Dalam Rekening Buku Besar.	33
Gambar III.1	Logo PT. Perkebunan Nusantara V.....	42
Gambar III.2	Struktur Organisasi dan Tata Kerja PTPN V.	45